

# **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN KEWIRAUSAHAAN DI PEDESAAN**

Oleh:

**Wiwiek Rabiatal Adawiyah Istiqomah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

## ***ABSTRACT***

*Development based on local potential in the area allows a region to produce output which has a comparative advantage (both in terms of raw materials and market location). Such development is expected to boost up the growth of the economy of the region, which in turn can create jobs in the area. This study aimed at examining various factors that influence the success of entrepreneurship programs in rural areas. The method used in this research is a survey method using qualitative and quantitative approaches. The sample in this study are businesses in the countryside. The survey was conducted in several different areas. The number of samples or the respondent in this study is as much as 83 businesses located in rural areas. Data collection method or instruments used in this study encompasses: observation, questionnaires and interviews. Data was analyzed using descriptive statistics for the purpose of determining challenges and opportunities in running a business in the countryside. The results showed that There are four factors that affect the likelihood of a person to engage in the business world, including demographic characteristics, business characteristics, business constraints and drivers of business success.*

**Keywords:** *Entrepreneurship, rural area, business success*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia memiliki rencana pencapaian bahwa pada tahun 2025 negara ini dapat berada di jajaran negara berpendapatan menengah. Ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena untuk berada di jajaran negara dengan berpendapatan menengah membutuhkan usaha yang cukup besar. Studi dari Harvard Kennedy School (2014), melaporkan bahwa setidaknya Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan pendapatan domestiknya (PDB Riil) dua kali lipat agar tujuannya tercapai.

Saat ini pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 3,8 persen per tahun, dan sebagaimana “aturan 70” bahwa untuk melipatgandakan pendapatan selama 10 tahun ke depan (pada tahun 2025) maka diperlukan pertumbuhan pendapatan sebesar 7 persen (70 dibagi 7 sama dengan 10 tahun). Untuk melipatgandakan pendapatan bukanlah hal yang mudah, terdapat banyak hambatan diantaranya kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan rendahnya daya saing.

Indonesia dapat dikatakan belum memanfaatkan keuntungannya sebagai negara besar. Jika menilik pada sejarah, setiap bangsa di awal era kemerdekaannya memiliki prioritas awal

untuk menjawab mengenai bagaimana pembangunan akan dilaksanakan. Pasca perang dunia ke dua, perhatian lebih diberikan kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Awalnya pemerintah dianggap sebagai penggerak atau motor utama yang paling berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal tersebut merupakan pandangan umum dalam pembangunan di negara-negara yang baru merdeka.

Namun demikian seringkali kenyataan yang terjadi adalah pemerintah menghambat pembangunan oleh karena tata kelola yang buruk, praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), serta adanya kepentingan-kepentingan politik tertentu (*crony capitalism*). Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pertumbuhan yang tinggi membawa pada timpangnya distribusi hasil pembangunan. Mekanisme yang dianut berupa *trickle-down effect* tidak terjadi dan meningkatkan kemiskinan.

Pendekatan pembangunan yang sentralistik terbukti tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Perkembangan selanjutnya adalah pemerintah Indonesia meneguhkan kembali jiwa desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Saragih, 2015). Lahirnya undang-undang tersebut membawa misi otonomi daerah yang membawa prinsip mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasar aspirasi serta dengan melihat kepada aspek potensi daerah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan wilayah berdasar potensi lokal seringkali masih melihat pada pembangunan fisik sebagai indikator keberhasilan dan masih mengesampingkan pembangunan manusianya. Pembangunan manusia atau upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membantu proses pembangunan. Menurut Sen (dalam Chalid, 2005) kebebasan merupakan inti dari pembangunan dan masyarakat harus dibebaskan dari sumber ketidakbebasan. Sumber ketidakbebasan diantaranya berupa kemiskinan (membuat orang tidak dapat kesempatan untuk memperoleh gizi yang baik), rendahnya peluang ekonomi (seperti peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luar rumah), dan pengabaian fasilitas publik. Dengan demikian pembangunan manusia (SDM) bukanlah suatu yang tidak dapat dilakukan dan tidak dapat ditunda-tunda (Chalid, 2005).

Pembentukan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan pembangunan ekonomi. Permasalahan yang seringkali muncul menurut Darwanto (2012), pembangunan SDM di Indonesia lebih diarahkan kepada pembentukan tenaga kerja atau karyawan bukannya pada pembentukan lapangan pekerjaan.

Sebagaimana kondisi pasar tenaga kerja saat ini dengan penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan tenaga kerja maka hampir mungkin terdapat tenaga kerja yang tidak terserap di pasar dan meningkatkan pengangguran. Sementara itu jumlah penyedia lapangan pekerjaan (*entrepreneur*) di Indonesia masih dikatakan sedikit. Santi dan Kumar (2011) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada perkembangan industrinya, dan perkembangan suatu industri bergantung pada kompetensi dari para pengusahanya.

Pendapat di atas mungkin sejalan dengan yang pernah diutarakan oleh ekonom Joseph Schumpeter pada tahun 1940an mengenai konsep *creative destruction*, yaitu sebagai sebuah mekanisme yang terus menerus berulang dan proses inovasi dimana produksi (barang dan jasa) baru menggantikan produk yang telah usang. Dengan demikian yang memainkan peranan utama di dalam proses ini adalah sektor usaha. Hal ini dikarenakan sektor usaha akan beraktivitas di sektor-sektor yang produktif. Lebih lanjut Schumpeter berpendapat bahwa kombinasi antara pengelolaan di sektor produktif dengan pengelolaan pada sumber daya akan

dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, sampai dengan negara akan berlomba-lomba untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru sebagai akselerator pembangunan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa negara Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena Indonesia masih dihadapkan pada beberapa masalah pembangunan seperti ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran. Salah satu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengembangan daerah dengan melihat pada potensi lokal.

### **Perumusan Masalah**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi terutama yang berkaitan dengan permasalahan di pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, di tahun 2010 mencatat bahwa terdapat 49 persen penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, sedangkan sisanya 51 persen penduduk tinggal di pedesaan. Tidak hanya permasalahan itu saja, namun juga sebagian besar penduduk miskin berada di desa, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Presentase Penduduk Miskin di Kota dan Desa Maret 2013-September 2014**

	Maret 2013	September 2013	Maret 2014	September 2014
Kota	8,39	8,52	8,34	8,16
Desa	14,32	14,42	14,17	13,76

Sumber: BPS, 2014

Penduduk miskin lebih banyak berada di daerah pedesaan (14 persen) dibandingkan dengan perkotaan (8 persen). Nampaknya hal ini dapat dijelaskan jika kita dapat melihat pada konsep dualisme ekonomi Boeke yang sering terjadi di negara-negara sedang berkembang. Di daerah pedesaan, umumnya menggunakan sistem tradisional (metode dan teknik yang diajarkan secara turun menurun). Hal ini membuat produktivitas pekerja rendah jika dibandingkan dengan sistem ekonomi modern perkotaan yang lebih padat modal. Selanjutnya relatif rendahnya produktivitas dibandingkan dengan pekerja di perkotaan maka upah yang diterima di desa pun rendah, sementara para pekerja di sistem ekonomi modern akan relative lebih memiliki upah tinggi ditambah lagi dengan keterampilan dan kecakapan yang mereka miliki akan makin meningkatkan perbedaan upah diantara kedua kelompok tersebut. Pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesempatan kerja serta kesenjangan pendapatan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk masalah pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan SDM di Indonesia seringkali ditujukan untuk pembentukan tenaga kerja atau karyawan dan jarang untuk pembentukan pengusaha-pengusaha. Pembentukan pengusaha-pengusaha ini diharapkan dapat menggunakan ide-ide inovatifnya guna menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Jika menilik pada studi usaha di Indonesia, bahwasannya profil usaha di Indonesia sebagian besar adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM dalam perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Peran serta UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha

Kecil & Menengah, bahwa pada tahun 2008 sektor UMKM berkontribusi terhadap penciptaan PDB Nasional sebesar Rp 2.6096 triliun atau 55,56 persen dan tercatat mampu menyerap yang ada sebanyak 97,10 persen tenaga kerja dari total tenaga kerja yang ada (Tabel 1.2).

**Tabel 1.2.**  
**Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional Tahun 2008**

No	Sektor	Porsi UMKM terhadap PDB (%)	Porsi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (%)
1	Pertanian	95,26	99,46
2	Pertambangan	12,73	89,05
3	Industri	31,53	85,05
4	Listrik, gas dan air bersih	7,57	65,41
5	Bangunan	37,22	96,11
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	96,34	99,27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	48,70	97,45
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa	62,72	94,45
9	Jasa-jasa	95,66	99,14
	Total	55,56	97,10

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah, 2008.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2, secara sektoral tenaga kerja UMKM menyebar hampir di semua sektor dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tertinggi oleh sektor UMKM adalah pada sektor pertanian dan perdagangan masing-masing sebesar 42 juta dan 24,31 juta tenaga kerja atau sekitar 73% dari total tenaga kerja di UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia ternyata cukup menggembirakan. Usaha ini memberikan banyak kontribusi pada perekonomian nasional, terutama dalam pembentukan output perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan pembangunan terutama kemiskinan dan pengangguran relative lebih banyak di desa. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia lebih condong pada pengembangan daerah dengan melihat pada potensi lokal. Potensi lokal tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan alam.

Sumber daya manusia seperti ketersediaan tenaga kerja dan pelaku usaha di daerah (desa) serta adanya bahan baku produksi sebagaimana yang disebutkan oleh Schumpeter

sebelumnya bahwa kombinasi keduanya dapat membantu dalam pembangunan ekonomi melalui mekanisme *creative destruction*. Dengan melihat pada permasalahan di atas maka dirasa perlu untuk melakukan analisa mengenai tantangan dan peluang usaha kewirausahaan di desa.

## **Review Literatur**

Istilah entrepreneur berasal dari bahasa Perancis “entreprendre” dan bahasa Jerman “unternehmen” yang keduanya berarti menjalankan atau berusaha. Sementara dalam The American Heritage Dictionary, istilah entrepreneur diartikan sebagai orang yang mengorganisir, menjalankan dan memperhitungkan resiko ke dalam bisnis. Sedangkan entrepreneurship, menurut Subroto (2013), adalah sebuah sikap, semangat, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang bernilai dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Santi dan Kumar (2011) juga berpendapat bahwa istilah entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sebuah tindakan melakukan usaha, dalam artian seorang yang melakukan inovasi, memiliki ketajaman dalam berdagang dan berhitung guna mengubah inovasi menjadi barang ekonomi.

Martin dan Osberg (2007) menyebutkan beberapa karakteristik penting yang dimiliki oleh para entrepreneur, yaitu:

1. *Inspired*. Seorang pengusaha akan terinspirasi untuk melakukan perubahan.
2. *Creative*. Seorang pengusaha berfikir kreatif dan mengembangkan solusi baru yang benar-benar berbeda dengan yang sudah ada.
3. *Direct Action*. Ketika seorang pengusaha telah terinspirasi dan berfikir kreatif maka mereka akan langsung bertindak memmanifestasikan idenya ketimbang menunggu orang lain yang melakukannya.
4. *Courage*. Seorang pengusaha memiliki keteguhan hati dalam menjalani proses inovasi, berani menanggung resiko dan kegagalan.
5. *Fortitude*. Seorang pengusaha memiliki keuletan dalam membuahkan solusi kreatif melalui pemahaman akan pasar.

Sementara itu terkait dengan kewirausahaan pedesaan, menurut Oruc et.al. (2013) beberapa literature telah melakukan identifikasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan tersebut. Sebagian besar membaginya ke dalam dua faktor yaitu faktor internal seperti karakteristik pengusaha dan karakteristik bisnisnya) sementara faktor eksternal seperti jumlah penduduk, ketersediaan bahan mentah, dukungan dari pemerintah, karakteristik pasar tenaga kerja dan barang dagangan, kualitas rantai produksi, serta ketersediaan bantuan pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajiberfun dan Daramola (2003) di negeria menemukan bahwa tingkat efisiensi dan pertumbuhan usaha sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari para pemilik usahanya. Pemilik usaha yang terdidik dapat memberikan dampak besar kepada keberlangsungan usaha. Inilah mengapa kemudian pendidikan dan pelatihan kepada para pelaku usaha terutama di daerah pedesaan menjadi penting. Pendidikan atas teknik pemasaran, distribusi, ataupun pengenalan teknologi baru akan meningkatkan kinerja usaha.

Pengaruh infrastruktur juga dapat berdampak kepada kinerja perusahaan. Ketersediaan jalan, air, listrik atau bahkan jaringan internet merupakan infrastruktur yang penting dalam menjalankan usaha di pedesaan. Semakin baik infrastruktur maka semakin baik pula kinerja pelaku usaha di pedesaan ini.

Peranan institusi dalam wirausaha pedesaan tidak dapat dikesampingkan. Oruc et.al. (2013) berpendapat bahwa suksesnya pembangunan pedesaan dipengaruhi oleh ketersediaan dan dukungan dari kelembagaan.

Secara spesifik, Santi dan Kumar (2011) memberikan beberapa kriteria tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pedesaan, diantaranya:

1. *Family Challenge*. Tantangan ini berupa seringkali para pelaku usaha terutama di pedesaan akan susah untuk meyakinkan kepada keluarganya mengapa memilih melakukan usaha dibandingkan dengan bekerja.
2. *Social Challenge*. Tantangan ini berupa penilaian dari masyarakat atas usaha yang kita pilih dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bekerja.
3. *Technological Challenge*. Tantangan kemajuan teknologi ke depannya tidak dapat dianggap mudah. Misalnya dengan kehadiran belanja online yang memudahkan para konsumen untuk membeli tanpa harus ke toko (secara fisik). Ini adalah peluang namun juga sekaligus tantangan bagi para pengusaha pedesaan.
4. *Financial Challenge*. Tantangan keuangan hampir selalu ada dalam menjalankan usaha. Di pedesaan, pelaku usaha di pedesaan umumnya masih menggunakan modal sendiri berupa tabungan pribadi misalnya.
5. *Policy Challenge*. Tantangan ini dalam bentuk kebijakan pemerintah terhadap para pengusaha yang berada di pedesaan. Sebagian besar pengusaha pedesaan adalah UMKM dan informal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan untuk pemberdayaan bagi para pelaku usaha kecil tersebut. Permasalahannya adalah seringkali banyak UMKM di pedesaan yang tidak terdaftar atau masih informal sehingga sulit bagi pemerintah untuk memutuskan kebijakannya.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha di pedesaan. Survei dilaksanakan di beberapa daerah berbeda, diantaranya adalah:

**Tabel 1.3. Sampel Penelitian**

Lokasi Usaha	Sampel		
Ajibarang	3	Jakarta	8
Babakan	1	Pemalang	1
Bandung	3	Purbalingga	11
Banjarnegara	4	Purwokerto	23
Bobotsari	3	Purworejo	3
Bumiayu	9	Yogyakarta	2
Cilacap	8	Jumlah	83
Cirebon	3		

Jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 83 pelaku usaha di pedesaan.

Metode pengumpulan data atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Penyebaran kuesioner dan wawancara
3. Web-based information and data.

Untuk mengolah dan menganalisis data kami menitikberatkan pada faktor yang menjadi tantangan dan peluang dalam menjalani usaha di pedesaan. Analisis data kami sajikan dalam bentuk deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

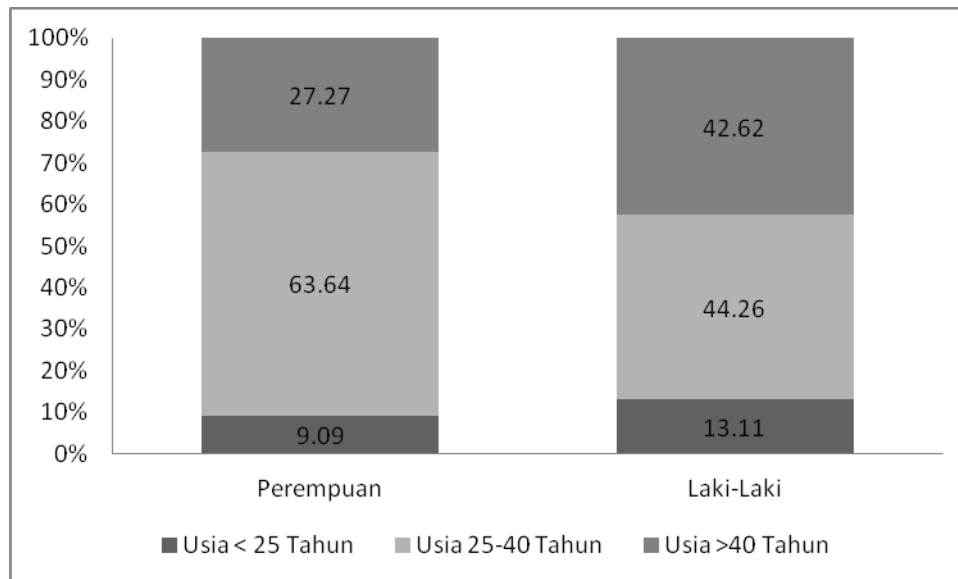
### 1. Faktor Internal

#### a. Karakteristik Pengusaha

Dari hasil survey dapat dilihat bahwa kepemilikan usaha menurut gender (jenis kelamin) masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 61 usaha. Namun demikian, pada usia produktif (usia 25-40 tahun) distribusi kepemilikan usaha menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa keterlibatan dalam bidang usaha yang dimiliki oleh perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, 63,64 persen berbanding 44,26 persen (Grafik).

**Tabel 1.4. Pemilik Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia**

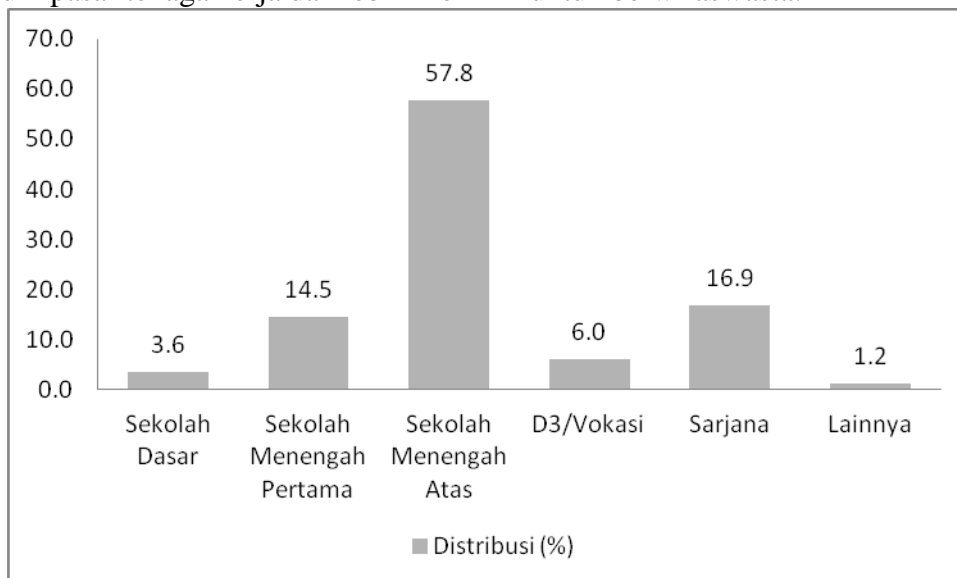
Keterangan	Perempuan (orang)	Laki-Laki (orang)
Usia <25 tahun	2	8
Usia 25-40 tahun	14	27
Usia >40 tahun	6	26
Total	22	61



Grafik 1.1. Kepemilikan Usaha menurut Jenis Kelamin di Tiap Usia

Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, hasil survey dapat dilihat pada Grafik. Grafik tersebut menunjukkan sebagian besar pelaku usaha dalam sampel penelitian, hampir separuhnya (57,8 persen) adalah lulusan sekolah menengah atas. Hal ini bisa jadi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar dari masyarakat desa sudah mengenyam wajib

belajar mereka lebih memilih untuk melakukan usaha atau juga bisa jadi mereka tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja dan lebih memilih untuk berwiraswasta.



Grafik 1.2. Distribusi Pendidikan Pelaku Usaha di Pedesaan dalam Sampel

Pelaku usaha yang masuk menjadi sampel dalam penelitian ini sebagaimana temuan sebelumnya ternyata tidak hanya pengusaha muda yang menjadi mayoritas, namun juga mereka berada pada tingkatan *entry-level* atau pengusaha baru. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 1.5 Lama Usaha dengan Tahun Mulai Usaha**

Tahun Mulai Usaha	Lama Usaha			Jumlah
	< 1 tahun	1-3 tahun	> 3 tahun	
Sebelum 1990	-	-	1	1
1990-1995	-	1	1	2
1995-2000	-	-	10	10
2000-2005	-	-	10	10
2005-2010	-	1	22	23
2010-2015	4	17	16	37
Jumlah	4	19	60	83

Sebagian besar pelaku usaha, 60 orang, dalam sampel telah menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun. Namun yang menarik adalah bahwa para pengusaha baru yang memulai usahanya pada tahun 2010-2015 mendominasi para pelaku usaha di pedesaan yang menjadi sampel. Sebanyak 37 pelaku usaha yang masuk dalam kategori pengusaha baru. Jika melihat pada kolom jumlah (paling kanan) dapat diambil pernyataan bahwa tiap 5 tahun sekali jumlah pengusaha pedesaan mengalami peningkatan. Ini dapat menunjukkan makin meningkatnya minat para warga di pedesaan untuk mulai terjun di dunia usaha.

#### b. Karakteristik Bisnis

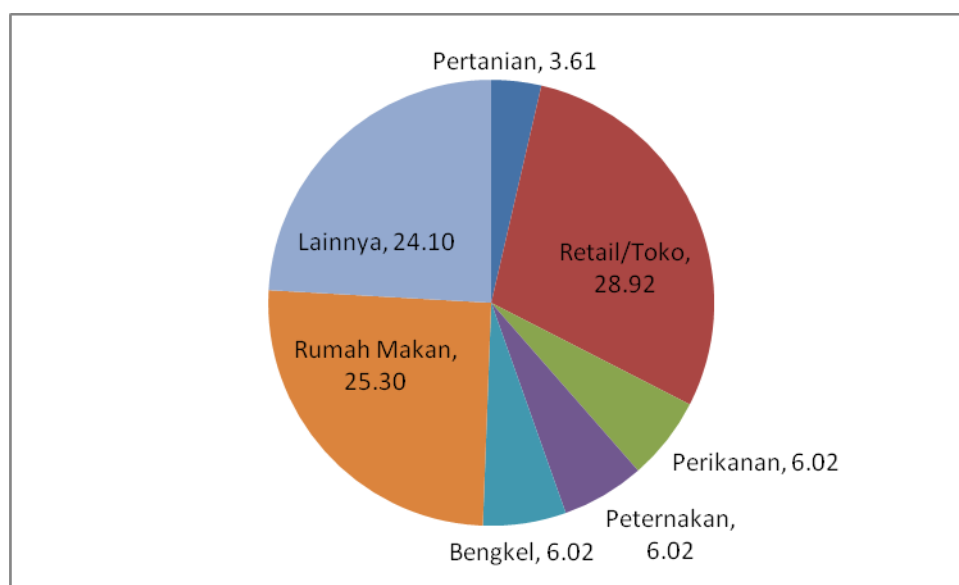
Hasil survey (Tabel dan Grafik) menunjukkan bahwa sebagian besar sampel pengusaha di pedesaan berada dalam tipe usaha Retail/Toko dan Rumah Makan. Untuk Toko/Retail



sebanyak 24 gerai atau 28,92 persen sedangkan Rumah Makan sebanyak 21 warung atau 25,3 persen. Sementara yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, serta peternakan menempati porsi ternendah dalam tipe usaha ini. Ini temuan yang dapat dikatakan unik karena di pedesaan justru bukan sumber daya alam yang menjadi basis usahanya. Dengan demikian dimungkinkan hasil-hasil alam tersebut sebagian besar masih dikonsumsi oleh masyarakat (masyarakat yang *subsistence*) atau produksinya habis untuk dikonsumsi.

**Tabel 1.6. Tipe Bisnis Sampel**

Tipe Bisnis	Pertanian	Retail/Toko	Perikanan	Peternakan	Bengkel	Rumah Makan	Lainnya	Total
Jumlah	3	24	5	5	5	21	20	83



Grafik 1.3. Distribusi Tipe Bisnis Sampel Penelitian

Terdapat sekitar 43 pelaku usaha yang usahanya adalah berbasis produksi. Mayoritas pelaku usaha yang berbasis produksi adalah usaha rumah makan, peternakan, pertanian. Sementara itu terdapat 32 usaha yang usahanya adalah berbasis re-seller. Pelaku usaha yang mendominasi basis re-seller adalah para pemilik usaha retail/toko.

Sementara itu hasil survey untuk karakteristik jumlah pegawai dan sumber modal usaha dapat dilihat pada Tabel, Tabel, dan Tabel. Menurut hasil survey, mayoritas para pelaku usaha di pedesaan memiliki pekerja kurang dari 20 orang atau jika menggunakan klasifikasi usaha menurut BPS, maka sebagian besar pelaku usaha di pedesaan tergolong ke dalam usaha mikro dan kecil (untuk usaha mikro mempekerjakan 1-4 orang sedangkan usaha kecil 5-19 orang).

**Tabel 1.7. Jumlah Pegawai**

Jumlah (Unit)	Jumlah Pegawai (orang)					
	20	20-40	41-60	61-80	81-100	>100
Jumlah (Unit)	78	3	0	1	0	1

Tabel menunjukkan hasil survey yang menanyakan sumber modal dalam melakukan usaha di pedesaan. Terdapat sebanyak 42 responden pelaku usaha pedesaan menjawab sumber modal usaha mereka berasal dari tabungan dan 21 responden menjawab berasal dari pinjaman bank.

**Tabel 1.8. Sumber Modal Usaha**

	Sumber Modal Usaha					
	Tabungan	Keluarga	Pinjam Teman	Menerima Bayaran	Pinjam Bank	Lainnya
Jumlah (Unit)	42	17	0	2	21	1

Sementara untuk melihat hubungan antara sumber permodalan pelaku usaha pedesaan yang tergolong pengusaha mikro dan kecil dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.7. Sumber Modal Usaha di tiap Golongan Usaha**

Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Sumber Modal Usaha						Jumlah
	Tabungan	Keluarga	Pinjam Teman	Menerima Bayaran	Pinjam Bank	Lainnya	
<20	39	16	0	2	20	1	78
20-40	2	-	-	-	1	-	3
41-60	-	-	-	-	-	-	0
61-80	-	1	-	-	-	-	1
81-100	-	-	-	-	-	-	0
>100	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah	42	17	0	2	21	1	83

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber modal usaha mikro dan kecil di pedesaan adalah beragam. Sebagian besar berasal modal usaha mikro dan kecil di desa adalah dari tabungan, kemudian diikuti oleh pinjaman bank dan yang berasal dari keluarga.

Sedangkan untuk komposisi aset perusahaan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.9. Komposisi Aset**

Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Sumber Aset						Jumlah
	Sendiri	Leasing	Meminjam	Hibah	Warisan	Lainnya	
<20	63	4	6	0	5	-	78
20-40	3	-	-	-	-	-	3
41-60	-	-	-	-	-	-	0
61-80	1	-	-	-	-	-	1
81-100	-	-	-	-	-	-	0
>100	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah	68	4	6	0	5	-	83

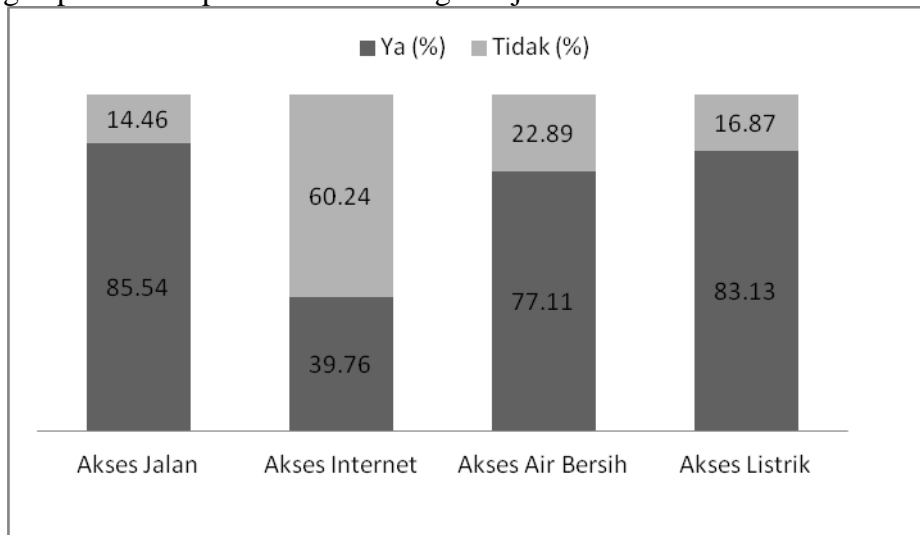
Sebagian besar asset perusahaan berasal dari asset pribadi pemilik perusahaan. Sedangkan jika dihubungkan dengan kriteria usaha, maka sumber asset usaha mikro dan kecil berasal dari pemilik usaha itu sendiri (terdapat 63 pelaku usaha mikro dan kecil).

## 2. Faktor Eksternal

Selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakteristik usaha dan bisnis, kewirausahaan pedesaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya

### a. Aksesibilitas

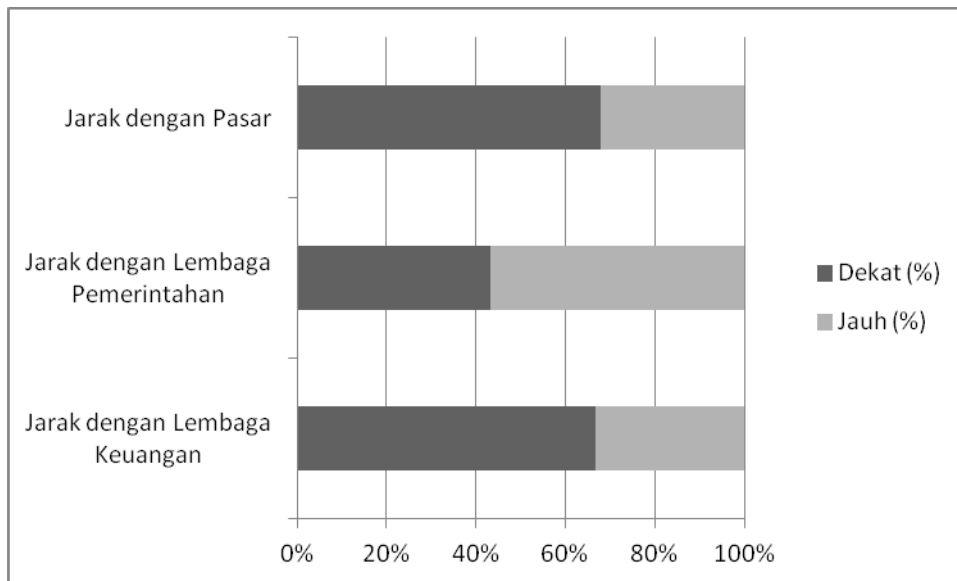
Aspek ini terkait dengan akses para pelaku usaha di pedesaan terhadap jalan, internet, air bersih, serta listrik. Hasil survey menunjukkan bahwa kendala pelaku usaha di pedesaan adalah terhadap akses internet. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar fasilitas internet berada di kota dan seringkali kurang menjangkau wilayah-wilayah desa atau bahkan pelosok. Keterbatasan akses internet ini dapat menjadi kendala, terutama di era saat ini dimana persaingan pemasaran produk baik barang dan jasa sudah secara *online*.



Grafik 1.4. Aksesibilitas Pelaku Usaha Desa atas Jalan, Internet, Air Bersih, dan Listrik

### b. Jarak (*Distance*)

Selanjutnya jarak juga dapat mempengaruhi minat kewirasusahaan di pedesaan. Pengusaha dapat memilih lokasi usaha yang lebih murah, apakah lebih dekat dengan sumber faktor produksi (bahan baku dan tenaga kerja) atau dekat dengan pasar. Sebagaimana hasil survey berikut ini bahwa sebagian besar pelaku usaha berlokasi dengan mempertimbangkan aspek pasar. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian besar responden memiliki usaha yang bergerak di bidang toko/retail dan rumah makan sehingga cenderung lebih memilih lokasi usaha yang dekat dengan pasar. Sementara itu, untuk jarak dengan lembaga pemerintahan menunjukkan hasil bahwa jarak menuju pelayanan publik berupa lembaga pemerintahan dirasa responden tidak cukup dekat. Ini disebabkan salah satunya karena pada umumnya lembaga pemerintahan berpusat di kota dan sebagian responden berlokasi di desa.

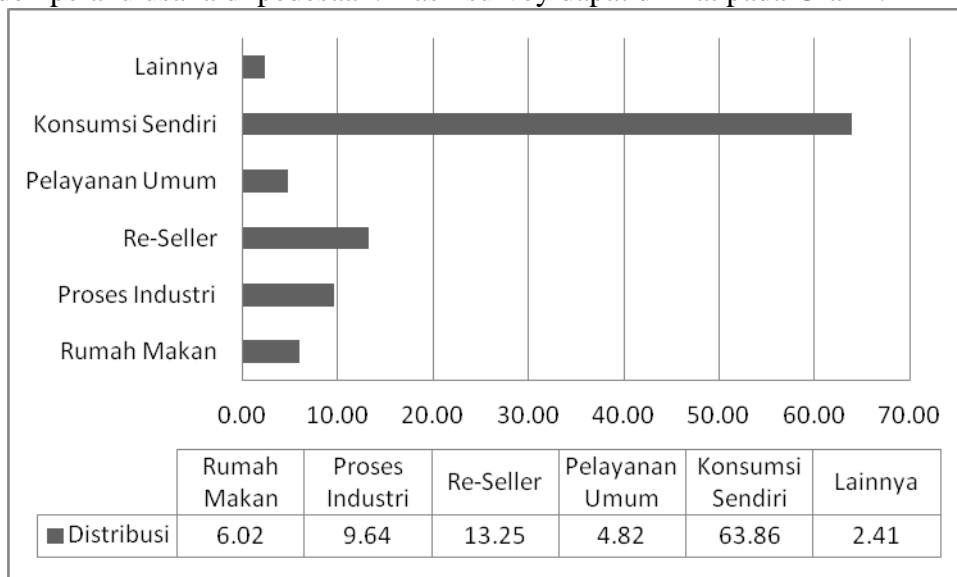


Grafik Jarak Lokasi Usaha dengan Pasar, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga Keuangan

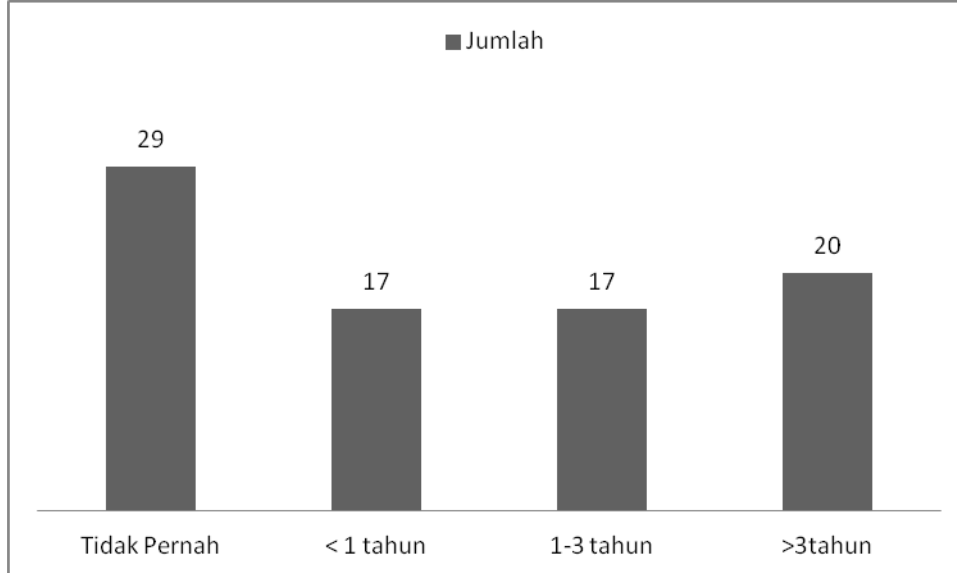
Untuk jarak dengan lembaga keuangan, hasil survey menunjukkan bahwa jaraknya tidak cukup jauh. Dengan demikian para responden merasa bahwa pelayanan keuangan (bank atau lembaga keuangan non-bank) dapat dijangkau dengan mudah.

Pembeli produk dari para pelaku usaha sebagian besar adalah untuk konsumsi pribadi (Grafik). Tercatat terdapat 63,86 persen responden yang barang jualannya dipakai untuk konsumsi pelanggan. Temuan ini sesuai dengan karakteristik pelaku usaha sebelumnya yang memang kebanyakan berada di bidang usaha untuk konsumsi. Sementara yang barang jualannya digunakan untuk dijual kembali atau konsumennya adalah re-seller sebanyak 13,25 persen.

Untuk pengalaman migrasi, terdapat 29 responden pemilik usaha adalah orang lokal atau belum pernah migrasi, sisanya sebagian besar adalah pendatang yaitu sebanyak 54 responden pelaku usaha di pedesaan. Hasil survey dapat dilihat pada Grafik.



Grafik 1.5. Distribusi Konsumen



Grafik 1.6. Pengalaman Migrasi

Hambatan-Hambatan dan Faktor-Faktor Pendukung dalam Menjalankan Wirasusaha di Desa.

Untuk mengetahui hasil survei mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat wirasusahawan di pedesaan untuk menjalankan usaha, penelitian ini menggunakan Likert Summated Rating (LSR). LSR dapat menunjukkan kecenderungan dari persepsi responden atas pernyataan yang diajukan.

Dengan menggunakan LSR maka kita dapat mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan usaha wiraswasta di pedesaan.

c. Aspek Administrasi

**Tabel 1.10 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question						
Jumlah Responden	Skor Untuk	Untuk Tiap	Jumlah Responden	Skor Untuk	Untuk Seluruh	
Maksimal	5x3 item	5	Maksimal	83X15	245	
Minimal	1x3 item		Minimal	83x3	49	
Median	3x3item		Median	83x9	47	
Kuartil I	2x3 item		Kuartil I	83x6	98	
Kuartil II	4x3 item	2	Kuartil II	83x12	96	
Angka	84					

Perolehan
Kesimpulan                      Setuju

Hasil olah data LSR menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan aspek kemudahan Administrasi. Atau dengan kata lain ketika menjalankan bisnisnya para wiraswasta di pedesaan menganggap administrasi adalah aspek yang penting.

d. Aspek Infrastruktur

**Tabel 1.11 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question					
Jumlah Responden	Skor	Untuk	Tiap	Jumlah Responden	Skor Untuk Seluruh
Maksimal	5x3 item	5	Maksimal	83X15	245
Minimal	1x3 item		Minimal	83x3	49
Median	3x3item		Median	83x9	47
Kuartil I	2x3 item		Kuartil I	83x6	98
Kuartil II	4x3 item	2	Kuartil II	83x12	96
Skor Hasil	951				
Kesimpulan	Setuju				

Untuk aspek infrastruktur, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju. Ini menunjukkan bahwa ketika menjalankan usahanya, responden menginginkan keberadaan infrastruktur yang memadai seperti biaya transportasi rendah, ketiadaan akses jalan, dan keberadaan angkutan umum. Dan ketiadaan fasilitas tersebut dapat menjadi hambatan bagi mereka dalam menjalankan usaha.

e. Aspek Kemampuan

**Tabel 1.12 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question					
Jumlah Responden	Skor	Untuk	Tiap	Jumlah Responden	Skor Untuk Seluruh
Maksimal	5x4 item	0	Maksimal	83X20	660
Minimal	1x4 item		Minimal	83x4	32
Median	3x4 item	2	Median	83x12	96

Kuartil I	2x4 item		Kuartil I	83x8	64
Kuartil II	4x4 item	6	Kuartil II	83x16	328
Skor Hasil	1323				
Kesimpulan	Setuju				

Dari aspek kemampuan usaha pun hasil analisis LSR menunjukkan bahwa responden sebagian besar responden menyatakan setuju, ini berarti mereka menganggap kemampuan usaha adalah faktor yang penting, seperti memiliki tenaga kerja yang terampil.

f. Aspek Pemasaran

**Tabel 1.13 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question					
Jumlah Responden	Skor Untuk Tiap Responden	Untuk Tiap Responden	Jumlah Responden	Skor Untuk Tiap Responden	Untuk Seluruh Responden
Maksimal	5x6 item	0	Maksimal	83X30	490
Minimal	1x6 item		Minimal	83x6	98
Median	3x6 item	8	Median	83x18	494
Kuartil I	2x6 item	2	Kuartil I	83x12	96
Kuartil II	4x6 item	4	Kuartil II	83x24	992
Skor Hasil	1690				
Kesimpulan	Setuju				

Sementara untuk aspek pemasaran, hasil LSR menunjukkan angka 1690 dengan demikian responden sebagian besar setuju dengan pernyataan terkait dengan aspek pemasaran. Hal ini berarti responden memandang aspek pemasaran seperti kemudahan memasarkan, sedikit pesaing, bahan baku yang murah dan mudah diperoleh, dan dekat dengan pasar merupakan faktor yang akan mempengaruhi mereka dalam menjalankan usahanya.

g. Aspek Kinerja

**Tabel 1.14 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question					
Jumlah Responden	Skor Untuk Tiap Responden	Untuk Tiap Responden	Jumlah Responden	Skor Untuk Tiap Responden	Untuk Seluruh Responden
Maksimal	5x3 item	5	Maksimal	83X15	245
Minimal	1x3 item		Minimal	83x3	

				49	
Median	3x3item	Median	83x9	47	
Kuartil I	2x3 item	Kuartil I	83x6	98	
Kuartil II	4x3 item	2	Kuartil II	83x12	96
Skor Hasil	918				
Kesimpulan	Setuju				

Untuk aspek kinerja, hasil dari LSR menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap kinerja merupakan aspek yang penting dalam menjalankan usahanya.

#### h. Aspek Keuangan

**Tabel 1.14 Hasil LSR Aspek Administrasi**

Question Type: Positive Question						
Jumlah Responden	Skor	Untuk	Tiap	Jumlah Responden	Skor	Untuk Seluruh Responden
Maksimal	5x2 item	0	Maksimal	83X10	30	
Minimal	1x2 item		Minimal	83x2	66	
Median	3x2 item		Median	83x6	98	
Kuartil I	2x2 item		Kuartil I	83x4	32	
Kuartil II	4x2 item		Kuartil II	83x8	64	
Skor Hasil	608					
Kesimpulan	Setuju					

Sementara untuk aspek keuangan, hasil dari LSR menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kriteria keuangan (seperti kemudahan mendapat pinjaman dan keuntungan usaha yang cukup besar) merupakan faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan usaha. Atau dengan kata lain jikalau faktor keuangan tersebut tidak memadai seperti susahnya mendapat kredit dan keuntungan usaha yang rendah maka akan menjadi kendala untuk para wiraswasta di pedesaan untuk menjalankan usaha.

#### 3. Faktor Pendorong Kesuksesan Bisnis

Selain faktor penghambat dalam menjalankan bisnis, responden juga ditanya mengenai persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang dianggap membantu kesuksesan usahanya. Berbeda dengan metode sebelumnya, analisis faktor pendorong kesuksesan menggunakan analisis likert di setiap itemnya dengan menggunakan indeks likert.

Dari hasil perhitungan indeks likert, diperoleh hasil sebagai berikut:



**Tabel 1.15 Hasil Penghitungan Indeks Likert**

No	Kriteria	Index	Hasil
1	Dukungan dari Keluarga	89.15662651	SP
2	Ketersediaan Bahan Produksi	88.75502008	SP
3	Pegawai yang baik	88.75502008	SP
4	Hubungan dengan Partner Lain	83.93574297	SP
5	Jaringan Bisnis	81.52610442	SP
6	Dukungan Pemerintah	79.11646586	SP
7	Menerima Pinjaman	73.89558233	SP
8	Diklat pemilik bisnis	71.48594378	SP
9	Pendidikan luar negeri	41.36546185	P
Keterangan: P penting, SP Sangat Penting			

Dari semua faktor pendorong kesuksesan dalam menjalankan usaha dapat dilihat dari tabel indeks di atas bahwa yang paling dianggap penting adalah dukungan dari keluarga (nilai index 89,1). Nilai indeks terendah adalah pendidikan di luar negeri dengan nilai sebesar 41,36 meskipun para responden masih menganggapnya sebagai salah satu faktor penting dalam menjalankan usahanya.

## KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk terjun dalam dunia usaha, diantaranya karaktersitik demografi, karakteristik bisnis, kendala usaha serta faktor pendorong kesuksesan usaha.
2. Aspek demografi yang paling berpengaruh adalah usia dan jenis kelamin (gender).
3. Aspek bisnis yang paling berpengaruh adalah sumber pembiayaan modal dan aset.
4. Sementara aspek hambatan yang paling berpengaruh adalah aspek administrasi dan infrastruktur.
5. Aspek faktor pendukung kesuksesan berpengaruh dalam meningkatkan kemungkinan suatu pembentukan usaha baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, Peni. 2005. "Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik". Kemitraan, Jakarta.
- Darwanto. 2012. "Peran *Entrepreneurship* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Disimenasi Riset Terapan Bidang Manajemen dan Bisnis Tingkat Nasional Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang.
- Harvard Kennedy School. 2014. "The Sum is Greater Than The Parts: Melipatgandakan Kemakmuran di Indonesia Melalui Integrasi Lokal dan Global". Gramedia, Jakarta.

- Head, K dan J. Ries. 1998."Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada". *Canadian Journal of Economics*.
- Martin, Roger and Sally Osberg. 2007. "Social Entrepreneurship: The Case of Definition". *Stanford Social Innovation Review*.
- Oruc, Norman, Selma Delalic, Lejla Kamenjas, Edlira Narazani, Isilda Mara, and Teute Saka. 2013. "Linking Rural Entrepreneurship and Diaspora in Albania and Bosnia-Herzegovina". *Regional Research Promotion Programme*.
- Santhi and Rajesh Kumar. 2011. "Entrepreneurship Challenges and Opportunities in India". *Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science, Vol.1*.
- Saragih, Jef Rudianto. 2015. "Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian". Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subroto, Wasipodo Tjipto. 2013."Entrepreneurship Development Course to Foster Character Merchandise in Support Economic Growth". *Asian Economic and Financial Review*.
- Winship, Christopher and Robert D Mare. 1984."Regression Model with Ordinal Variables". *American Sociological Review*.